

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB
NOMOR 59 TAHUN 2020**

Grandys Frieska Prassida¹⁾, Giovany Muhammad Rifky²⁾

^{1,2} Departemen Sistem Informasi, Universitas Internasional Semen Indonesia
grandys.prassida@uisi.ac.id

ABSTRACT

The use of information and communication technology in the government environment, which is currently known as the Electronic-Based Government System (SPBE), is absolutely necessary. In fact, the implementation of SPBE needs to be continuously monitored and evaluated periodically in order to ensure the improvement of public services' quality in government agencies. This can be referred to the Regulation of the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Permen PAN-RB) Number 59 of 2020. The monitoring and evaluation of SPBE carried out in this study aims to measure the maturity level of SPBE implementation in the Balikpapan City Government in 2022 with reference to the guidelines contained in Permen PAN-RB Number 59 of 2020. This research establishes several stages in its implementation starts from literature studies, development of monitoring and evaluation instruments, online data collection, calculation of maturity level of SPBE implementation, to analysis of results and recommendations. The final result of the Balikpapan City Government's SPBE index value for 2022 is 3.11, which is included in the "Good" predicate. Most of the indicators in the SPBE Governance and Service domain have met the criteria in Permen PAN-RB Number 59 of 2020. However, several other indicators, particularly in the SPBE Management domain, still have quite low values, so this raises gaps for improvement that are conveyed in the recommendations section in this study.

Keywords: *Monitoring and Evaluation, Maturity Level, SPBE, Balikpapan City Government, PAN-RB Regulation Number 59 of 2020*

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, yang saat ini dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mutlak diperlukan. Bahkan penerapan SPBE perlu terus dipantau dan dievaluasi berkala dalam rangka menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020. Pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan penerapan SPBE di Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 dengan mengacu pada pedoman yang ada dalam Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Penelitian ini menetapkan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya mulai dari studi literatur, pembuatan instrumen pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data yang dilakukan secara daring, perhitungan tingkat kematangan penerapan SPBE, hingga analisis hasil dan rekomendasi. Hasil akhir nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 yakni sebesar 3,11, yang termasuk dalam predikat "Baik". Untuk indikator yang ada pada domain Tata Kelola dan Layanan SPBE sebagian besar telah memenuhi kriteria yang ada pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Namun, beberapa indikator lainnya, khususnya pada domain Manajemen SPBE, masih memiliki nilai yang cukup rendah, sehingga hal tersebut memunculkan celah perbaikan atau peningkatan yang disampaikan pada bagian rekomendasi dalam penelitian ini.

Keywords: *Pemantauan dan Evaluasi, Tingkat Kematangan, Penerapan SPBE, Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang berstandar dunia, yakni sistem pemerintahan yang transparan, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka pemanfaatan sistem informasi atau teknologi informasi (SI/TI) dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mutlak diperlukan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 [1] mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Penerapan SPBE di berbagai instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan guna mendorong pencapaian tingkat kematangan SPBE yang lebih tinggi di level nasional. Untuk itu, pentingnya pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala dan menyeluruh telah digaungkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020 [2], yang diterbitkan sebagai pengembangan atas Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 [3].

Dalam implementasinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE pada seluruh instansi pemerintahan. Kegiatan evaluasi SPBE dapat dilakukan melalui metode *self-assessment* yang dilaksanakan oleh evaluator internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, serta melalui metode evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal. Tujuannya yakni untuk mengetahui sejauh mana kualitas penyelenggaraan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan tingkat penerapan SPBE di suatu instansi yang ditinjau dari domain-domain tertentu.

Beberapa penelitian terdahulu terkait SPBE telah berfokus pada evaluasi penerapannya [4], [5], [6], [7], [8], namun sebagian penelitian tersebut masih mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 [4],[5]. Sedangkan yang lainnya, masih menggunakan PERPRES Nomor 95 Tahun 2018 [6], [7] atau hanya mengadopsi kerangka kerja SPBE sebagai landasan penelitian [8]. Dengan demikian, masih belum banyak artikel yang menggunakan Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pemerintahan, seperti yang telah diketahui pada Pemerintah Kota Yogyakarta [9], Pemerintah Kabupaten Gresik [10], dan Pemerintah Kota Tangerang [11].

Kota Balikpapan yang diharapkan memegang peranan penting sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang perlu memastikan penerapan SPBE agar terus lebih baik. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan SPBE, Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengetahui tingkat kematangan penerapan SPBE, terutama untuk melihat ketercapaian indikator-indikator yang ada pada domain-domain SPBE. Sehingga, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut memunculkan celah perbaikan atau peningkatan guna memperoleh indeks yang lebih baik pada evaluasi berikutnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan penerapan SPBE Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2022 berdasarkan Permen PAN-RB nomor 59 tahun 2020. Selain itu, hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini juga dapat menjadi usulan pengembangan terkait penerapan SPBE di Kota Balikpapan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Pemantauan dan evaluasi SPBE pada penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada metode pemantauan dan evaluasi SPBE yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Secara spesifik, tahapan pelaksanaan penelitian dalam pemantauan dan evaluasi SPBE dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan untuk menemukan, mempelajari, dan menguji teori maupun praktik yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi penelitian yang memuat teori atau praktik tersebut dapat diperoleh dari artikel jurnal, buku, maupun peraturan yang relevan.

2. Pembuatan Instrumen

Pada tahap ini, pembuatan instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE mengacu pada kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE yang ada dalam Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020. Instrumen dalam penelitian ini mengadopsi seluruh domain, aspek, dan indikator pada Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020, yang nantinya akan digunakan dalam proses penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE didapatkan melalui pertemuan daring (menggunakan *platform Google Meet*) dengan narasumber dari bidang E-Government Diskominfo Kota Balikpapan. Selain pengumpulan data untuk pengisian instrumen, juga dilakukan wawancara dan validasi dengan perwakilan Bidang E-Government Diskominfo Kota Balikpapan serta penandatanganan kesesuaian isi hasil penilaian pada dokumen instrumentasi pemantauan dan evaluasi SPBE.

4. Perhitungan tingkat kematangan

Pada tahap ini dilakukan perhitungan tingkat kematangan (*maturity*

level) SPBE dengan memperhatikan bobot penilaian dan formulasi penghitungan nilai indeks berdasarkan Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020. Nilai indeks terdiri atas: (a) indeks aspek, (b) indeks domain, dan (c) indeks SPBE, dimana masing-masing nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penjelasan lebih detil akan disampaikan pada bagian selanjutnya dalam artikel ini.

5. Analisis Hasil dan Rekomendasi

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil tingkat kematangan penerapan SPBE yang didapatkan dari tahapan sebelumnya. Kemudian dari hasil temuan yang ada dapat diusulkan rekomendasi untuk upaya peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Balikpapan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil akhir yang diperoleh dari proses pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Balikpapan yakni berupa nilai indeks SPBE yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks tersebut kemudian ditentukan predikat penilaiannya dan diuraikan kriteria tingkat kematangannya berdasarkan kapabilitas proses dan layanan. Secara detil, hasil yang didapatkan akan dijelaskan melalui tahap demi tahap pada bagian ini.

A. Domain, Aspek, dan Indikator

Dalam Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 terdapat keterkaitan antara domain, aspek, dan indikator yang digunakan untuk proses penilaian tingkat kematangan SPBE. Secara spesifik, terdapat 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator yang diadopsi dalam penelitian ini (ditunjukkan pada Tabel 1). Instrumentasi yang disusun dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berisi kuesioner dan lembar kerja penilaian tingkat kematangan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan

indeks SPBE. Di dalam instrumentasi tersebut juga nantinya dapat dilakukan penghitungan nilai indeks sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Tabel 1 di bawah ini juga menjelaskan distribusi bobot dari domain, aspek, dan indikator yang digunakan dalam penghitungan nilai indeks SPBE.

Tabel 1 Bobot Domain, Aspek, Indikator

Domain	Aspek (%Bobot)	Indikator	Bobot
Domain 1: Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (13%)	Indikator 1: Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
		Indikator 2: Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
		Indikator 3: Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3
		Indikator 4: Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3
		Indikator 5: Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,3
		Indikator 6: Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
		Indikator 7: Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
		Indikator 8: Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3
		Indikator 9: Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,3
		Indikator 10: Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Total Bobot Domain Kebijakan Internal SPBE (%)			13
Domain 2: Tata Kelola SPBE	Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE (10%)	Indikator 11: Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
		Indikator 12: Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
		Indikator 13: Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,5
		Indikator 14: Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,5
	Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi (10%)	Indikator 15: Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,5
		Indikator 16: Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,5
		Indikator 17: Tingkat Kematangan Layanan Jaringan	2,5

Domain	Aspek (%Bobot)	Indikator	Bobot		
		Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah			
		Indikator 18: Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5		
	Aspek 4: Penyelenggara SPBE (5%)	Indikator 19: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5		
		Indikator 20: Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,5		
Total Bobot Domain Tata Kelola SPBE (%)			25		
Domain 3: Manajemen SPBE	Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE (12%)	Indikator 21: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,5		
		Indikator 22: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,5		
		Indikator 23: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,5		
		Indikator 24: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,5		
		Indikator 25: Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,5		
		Indikator 26: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,5		
		Indikator 27: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,5		
		Indikator 28: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,5		
	Aspek 6: Pelaksanaan Audit TIK (4,5%)	Indikator 29: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,5		
		Indikator 30: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,5		
		Indikator 31: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,5		
		Total Bobot Domain Manajemen SPBE (%)			16,5
		Domain 4: Layanan SPBE	Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,5%)	Indikator 32: Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
				Indikator 33: Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34: Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75				
Indikator 35: Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75				
Indikator 36: Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75				
Indikator 37: Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75				
Indikator 38: Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75				
Indikator 39: Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75				
Indikator 40: Tingkat Kematangan Layanan	2,75				

Domain	Aspek (%Bobot)	Indikator	Bobot	
Aspek 8: Layanan Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik (18%)	Aspek 3: Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Indikator 41: Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75	
		Indikator 42: Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3	
		Indikator 43: Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	
	Indikator 44: Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3		
	Indikator 45: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3		
	Indikator 46: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3		
	Indikator 47: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3		
	Total Bobot Domain Layanan SPBE (%)			45,5
	Total Bobot Keseluruhan			100

Aspek (Bobot=BA)	Indikator	Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator or (BI)(%)	NI*BI (%)	Jumlah Nilai (NI*BI)	Indeks Aspek (1/BA*Jumlah Nilai (NI*BI))
Aspek 3 (10)	Indikator 16	4	2,50	10,00	35,00	3,50
	Indikator 17	3	2,50	7,50		
	Indikator 18	3	2,50	7,50		
Aspek 4 (5)	Indikator 19	5	2,50	12,50	22,50	4,50
	Indikator 20	4	2,50	10,00		
Aspek 5 (12)	Indikator 21	1	1,50	1,50	16,50	1,38
	Indikator 22	1	1,50	1,50		
	Indikator 23	1	1,50	1,50		
	Indikator 24	2	1,50	3,00		
	Indikator 25	2	1,50	3,00		
	Indikator 26	1	1,50	1,50		
	Indikator 27	1	1,50	1,50		
	Indikator 28	2	1,50	3,00		
Aspek 6 (4,5)	Indikator 29	2	1,50	3,00	9,00	2,00
	Indikator 30	2	1,50	3,00		
	Indikator 31	2	1,50	3,00		
Aspek 7 (27,5)	Indikator 32	4	2,75	11,00	101,75	3,70
	Indikator 33	4	2,75	11,00		
	Indikator 34	4	2,75	11,00		
	Indikator 35	4	2,75	11,00		
	Indikator 36	4	2,75	11,00		
	Indikator 37	3	2,75	8,25		
	Indikator 38	4	2,75	11,00		
	Indikator 39	4	2,75	11,00		
	Indikator 40	3	2,75	8,25		
	Indikator 41	3	2,75	8,25		
Aspek 8 (18)	Indikator 42	4	3,00	12,00	66,00	3,67
	Indikator 43	3	3,00	9,00		
	Indikator 44	3	3,00	9,00		
	Indikator 45	4	3,00	12,00		
	Indikator 46	4	3,00	12,00		
	Indikator 47	4	3,00	12,00		

Tabel 3 Perhitungan Indeks Domain

Domain (Bobot=BD)	Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek (BA) (%)	NA*BA (%)	Jumlah Nilai (NA*BA)	Indeks Domain (1/BD*Jumlah Nilai (NA*BA))
Domain 1 (13)	Aspek 1	2,30	13,00	29,90	29,90	2,30
Domain 2 (25)	Aspek 2	3,00	10,00	30,00	87,50	3,50
	Aspek 3	3,50	10,00	35,00		
	Aspek 4	4,50	5,00	22,50		
Domain 3 (16,5)	Aspek 5	1,38	12,00	16,50	25,50	1,55
	Aspek 6	2,00	4,50	9,00		
Domain 4 (45,5)	Aspek 7	3,70	27,50	101,75	167,75	3,69

Tabel 4 Perhitungan Indeks SPBE

Domain	Nilai Indeks Domain (ND)	Bobot Domain (BD)(%)	ND*BD (%)	Jumlah Nilai (ND*BD)	Indeks SPBE (1/100*JUMLAH NILAI (ND*BD))
Domain 1	2,30	13	29,90	310,65	3,11
Domain 2	3,50	25	87,50		
Domain 3	1,55	16,5	25,50		
Domain 4	3,69	45,5	167,75		

B. Perhitungan Tingkat Kematangan

Perhitungan tingkat kematangan SPBE ini terbagi menjadi 3 tahap perhitungan nilai indeks yaitu indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut. Sedangkan nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Tabel-tabel di bawah ini (Tabel 2-4) menunjukkan rincian hasil perhitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE.

Tabel 2 Perhitungan Indeks Aspek

Aspek (Bobot=BA)	Indikator	Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator or (BI)(%)	NI*BI (%)	Jumlah Nilai (NI*BI)	Indeks Aspek (1/BA*Jumlah Nilai (NI*BI))
Aspek 1 (13)	Indikator 1	2	1,30	2,60	29,90	2,30
	Indikator 2	2	1,30	2,60		
	Indikator 3	3	1,30	3,90		
	Indikator 4	3	1,30	3,90		
	Indikator 5	3	1,30	3,90		
	Indikator 6	2	1,30	2,60		
	Indikator 7	1	1,30	1,30		
	Indikator 8	2	1,30	2,60		
	Indikator 9	2	1,30	2,60		
	Indikator 10	3	1,30	3,90		
Aspek 2 (10)	Indikator 11	3	2,50	7,50	30	3,00
	Indikator 12	3	2,50	7,50		
	Indikator 13	3	2,50	7,50		
	Indikator 14	3	2,50	7,50		
	Indikator 15	4	2,50	10,00		

proses tingkat 3 (Terdefinisi) dan tingkat kapabilitas layanan tingkat 3 (Transaksi).

C. Temuan dan Rekomendasi

Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dari proses pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Balikpapan. Selanjutnya, rekomendasi akan diberikan pada setiap hasil temuan yang ada dengan merujuk pada aspek tertentu pada setiap domain. Hasil temuan dan rekomendasi tersebut diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Temuan dan Rekomendasi

Domain	Hasil Temuan	Rekomendasi
Kebijakan Internal SPBE	Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan kriteria tingkat 3 pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 (utamanya pada indikator 7), serta sebagian kebijakan internal yang dilaksanakan masih belum didukung adanya dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketersediaan dokumentasi secara tertulis dan formal untuk mengatur seluruh pelaksanaan kebijakan internal SPBE. Meningkatkan kematangan kebijakan internal yang mengatur penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Balikpapan.
Tata Kelola SPBE	Secara umum, pencapaian tingkat kematangan indikator pada domain ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria tingkat 3 sesuai Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Namun, ada temuan kecil yang dapat diperhatikan seperti pada layanan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan yang menghubungkan seluruh unit kerja pada pemerintah kota Balikpapan.	Meningkatkan interkoneksi layanan jaringan intra pemerintah dan integrasi sistem penghubung layanan agar tata kelola yang sudah terlaksana dapat saling terhubung.
Manajemen SPBE	Sebagian besar tingkat kematangan indikator pada domain ini belum sesuai dengan kriteria tingkat 3 pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, utamanya dari Aspek Penerapan Manajemen SPBE. Sedangkan terkait pelaksanaan audit TIK masih perlu disesuaikan dengan pedoman audit yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan manajemen risiko SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Memastikan pengendalian keamanan informasi telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja Memastikan pelaksanaan manajemen data telah merujuk pada pedoman terkait pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data Meningkatkan kualitas penerapan manajemen

Domain	Hasil Temuan	Rekomendasi
		<p>pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan manajemen perubahan telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja
Layanan SPBE	Secara umum, pencapaian tingkat kematangan indikator pada domain ini dapat dikatakan cukup memenuhi kriteria tingkat 3 sesuai Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Namun, ada temuan kecil seperti masih terdapat beberapa layanan elektronik yang belum terintegrasi karena adanya perubahan sistem dari pusat.	Meningkatkan integrasi layanan publik berbasis elektronik yang telah digunakan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pusat dan membuat panduan penggunaan sistem untuk para stakeholder terkait.

SIMPULAN

Pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan penerapan SPBE Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2022 berdasarkan Permen PAN-RB nomor 59 tahun 2020. Dari perhitungan tingkat kematangan didapatkan hasil akhir indeks SPBE Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 yakni sebesar 3,11, yang termasuk dalam kategori “Baik”. Indeks SPBE tersebut mencerminkan tingkat 3 (Terdefinisi) untuk kematangan kapabilitas proses, yang artinya proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang disesuaikan dengan pedoman/standar yang ada dan diterapkan dalam unit kerja yang ada pada Pemerintah Kota Balikpapan, namun keterpaduan antar unit kerja belum diarahkan dan dikendalikan dalam pelaksanaan proses kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE. Selain itu, nilai indeks SPBE tersebut untuk kematangan kapabilitas layanan menunjukkan pencapaian pada tingkat 3 (Transaksi), yang artinya sistem elektronik Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis dan mampu memberikan fasilitas

transaksi kepada pengguna SPBE, namun kolaborasi atau integrasi antar layanan SPBE masih perlu ditingkatkan.

Seperti yang telah diketahui, penelitian ini terbatas hanya melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2022. Hal ini memunculkan potensi pengembangan penelitian di masa depan untuk dapat mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam beberapa tahun terakhir dan menganalisis perkembangan penerapannya yang ditinjau dari domain, aspek, dan indikator sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Sehingga dapat diketahui kenaikan nilai indeks aspek dan domain mana yang cukup signifikan dan mana yang masih perlu perhatian lebih serius untuk mencapai nilai indeks SPBE yang terus lebih baik lagi di tahun berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kota Balikpapan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data dan informasi untuk kebutuhan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia atas saran dan umpan balik yang diberikan terhadap hasil dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Indonesia, 2018, p. 110.
- [2] M. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, *PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020*. Indonesia, 2020, pp. 1689–1699.
- [3] M. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 2018.
- [4] A. A. Bouty, M. H. Koniyo, and D. Novian, “The Evaluation of Electronic Based Government System Using E-Government Maturity Model (Case in Government of Gorontalo City),” *Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, vol. 23, no. 1, pp. 16–24, 2019.
- [5] Putu Dipa Pradnya Pratiwi, Gusti Agung Ayu Putri, and Gusti Made Arya Sasmita, “Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali,” *Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2020.
- [6] Khaidarmansyah and Ridwan Saifuddin, “Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Provinsi Lampung,” *Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Provinsi Lampung*, vol. 16, no. 1, pp. 1–11, 2022.
- [7] A. N. Rahmadi, M. Jibril, and A. Muhammad, “Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation of E-Government in Probolinggo (Study of Presidential Regulation Number 95

- of 2018 Concerning Elect,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 19, no. 3, pp. 1–11, 2021.
- [8] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.
- [9] D. Setiawan Putra, S. Selo, and S. Fauziati, “Evaluasi Domain Manajemen Spbe Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020,” *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 5, no. 1, pp. 54–61, 2022, doi: 10.33387/jiko.v5i1.4265.
- [10] R. S. Dewi, A. H. Astiarasanti, and F. Z. Fahmi, “Pemantauan dan Evaluasi Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020,” *Journal of Digital Business and Innovation Management*, vol. 1, no. 1, pp. 56–68, 2022.
- [11] B. S. Ipung Sutejo and G. Firmansyah, “Evaluation of SPBE Management Domain of Tangerang City Government Based on Regulation of the Minister of PAN-RB Number 59 of 2020,” in *Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022*, 2022, pp. 105–116, doi: 10.2991/978-94-6463-084-8.